



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Alamat : Jl. R. A. Kartini, Masohi.

Telp. (0914) – 21109

Fax. (0914) – 21109

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BADWI TUBAKA**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUSSAMAD NINGKEULA**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Selaku Atasan langsung Pihak Pertama.
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Masohi, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ABDUSSAMAD NINGKEULA

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

BADWI TUBAKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A. Program Dukungan Manajemen (076.WA)			
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355)	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	2 Laporan
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan (3355)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	100 %
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran(3355)	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	100 %
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku (3355)	Jumlah laporan Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.	2 Laporan
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien (3357)	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 Laporan
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien (3357)	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu;	90 %
		Persentase target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.	100%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu.	85 %
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumberdaya manusia (3358)	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;	90%
		Persentase penegakkan disiplin pegawai.	85 %
8	Tersedianya data dan informasi kepegawaian (3358)	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	100 %
9	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku (3358)	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
10	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok (3358)	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dandibentuk.	10.106 orang
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip (3360)	Persentase dalam mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan.	90%
12	Terwujudnya dukungan saranadan prasaranaguna meningkatkan kelancaran tugasKPU(3360)	Persentase saranatransportasi untukmendukung kinerjapegawai yang berfungsi denganbaik;	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik;	90%
13	Terwujudnya keamanan dan Ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah (3360)	Persentase gangguankeamanan dalamlingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dapat ditanggulangi.	90%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan Eksternal dilingkungan KPU (3361)	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal Terhadap Realisasi Anggaran.	90%
15	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP (3361)	Nilai Maturitas SPIP.	90%
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih danberwibawa (<i>clean governance</i>) (3361)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	90%
17	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,BPKP dan APIPKPU dalam pencapaian tujuan KPU (3361)	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,BPKP dan APIP yangditindaklanjuti.	90%
18	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah (3361)	Persentase unuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B.	90%
19	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja (3361)	Persentase telah melaksanakan pembangunan ZonaIntegritas Menuju WBK/WBBM.	90%
20	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasiserta penerapan e - government KPU (6634)	Persentase dalammelaksanakan Pemutakhiran datapemilih secara berkelanjutan;	90%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar;	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase aplikasi diterapkan secara terintegrasi.	90%
21	Peningkatan kompetensi SDM KPU (6635)	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM;	85%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, dan Hukum) sesuai jadwal.	80%

B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik;	85%
		Persentase melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara;	90%
		Persentase mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan.	100%
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan;	90 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	90%
3	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas, Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana.	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum, pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih disabilitas;	100%
		Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/ Bencana,	85%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP;	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.	90%
5	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu /Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	100%
6	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum;	90%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Maluku Tengah	85%
7	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan.	90%
8	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	90%
9	Pengelolaan calon peserta Pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi.	100%
10	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU Kabupaten Maluku Tengah.	90%
11	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat Dukungan calon perseorangan yang Disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan;	90%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	90%

No.	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 40,226,061,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,323,692,000,-

Masohi, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH



ABDUSSAMAD NINGKEULA

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH



BADWI TUBAKA